



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 73/M.PPN/HK/06/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

**KETIGA : ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 73/M.PPN/HK/06/2013  
TANGGAL 21 JUNI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

- A. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. **TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA**
- Ketua merangkap Anggota : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota: Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Sub Direktorat Sistem Pendukung Usaha Kecil Menengah, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
3. Direktur ...

3. Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Direktur Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
8. Direktur Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Tanaman Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Pasca Panen dan Pembinaan Usaha, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Budidaya Serelia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
12. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

14. Sekretaris ...

14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah I, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
17. Direktur Industri Kecil dan Menengah Wilayah III, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
20. Direktur Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komuditas Unggulan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
22. Asisten Deputi Urusan Wilayah Strategis, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
23. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

25. Dr. Totok ...

25. Dr. Totok Haribowo, staf Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Drs. Edid Erdiman, M.Si, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Erna Gustina Norrista, SP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Syifaa Tresnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Ir. Tony J. Kristianto, Dewan Jagung Nasional;
33. Hariadi Adnan, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI);
34. Muhammad Billahmar, Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin);
35. Aris Widodo, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO);
36. Suharto Honggokusumo, Staf Ahli Dewan Karet Indonesia;
37. Askam Sudin, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan Ternak;
38. Arif Budiman, *Green Health Agriculture*;
39. Dyah Astuti, Komite Produktivitas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Sholihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Mira Berlian, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun